Jurnal Pembangunan Daerah
Vol. 1, No. 2, Oktober 2025, hal. 39-59

Mengatasi Tantangan dalam Mewujudkan Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin – Evaluasi Program PB *Backlog*

Tackling the Challenges on Advancing Decent Housing for Poor Families – Assessing the PB Backlog Program

Basyier Gemaning Insan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Info Artikel
Diterima : 31 Januari 2025
Direvisi : 19 Juni 2025
Disetujui : 29 September 2025

Kata kunci:
Rumah Layak Huni
Program Bantuan Stimulan
Program PB *Backlog*
Keluarga Miskin

Keywords:
Decent Homes
Stimulant Program
PB Backlog Program
Poor Families

Corresponding Author:
Basyier Gemaning Insan
bg.insan@gmail.com
+62 817-5454-280

Ringkasan Eksekutif

Pemenuhan rumah layak huni merupakan salah satu kebijakan dalam rangka menanggulangi permasalahahan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program Bantuan Stimulan Pembangunan Rumah Baru bagi keluarga miskin yang belum memiliki rumah bernama Program PB Backlog. Program tersebut dimulai sejak tahun 2020 dan masih berjalan hingga saat ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk program PB Backlog yang dibangun pada tahun 2020, hanya 40,88% yang dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni, sisanya masih meninggalkan permasalahan seperti pemenuhan akses air minum, sanitasi, tidak ada kamar mandi dan listrik sehingga program tersebut belum mampu menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat miskin secara paripurna. Makalah ini akan mendiskusikan beberapa penyebab permasalahan, alternatif kebijakan serta pilihan kebijakan yang dapat diambil di kemudian hari untuk menjawab beberapa permasalahan yang terjadi. Makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penentu kebijakan khususnya untuk penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah periode 2025-2029

Executive Summary

Providing decent housing is a key policy to address poverty alleviation. The Provincial Government of Central Java has implemented the Stimulant Assistance Program for New Home Construction, targeting poor families who do not yet own a house. This program, known as PB Backlog, was launched in 2020 and remains active to date. However, evaluation results in 2024 from the 2020 implementation reveal that only 40.88% qualify as decent housing. The remaining units exhibit deficiencies such as a lack of access to drinking water, sanitation facilities, bathrooms, and electricity, indicating that the program has yet to fully achieve its goal of providing decent homes for poor families. This paper explores the underlying issues contributing to these challenges, proposes alternative policy approaches, and discusses potential strategies for future implementation. It aims to provide valuable insights for policymakers, particularly in preparing the 2025-2029 regional medium-term development plan.

DOI: 10.36762/jpd.v1i2.1270

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah isu global yang menjadi perhatian dunia hingga saat ini. Kemiskinan menjadi masalah yang dihadapi oleh hampir seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 8,57%, sedangkan di Jawa Tengah sebesar 9,58% atau setara 3,40 juta jiwa. Kondisi kemiskinan di Jawa Tengah masih di atas rata-rata nasional dan tentu saja kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja penurunan kemiskinan secara nasional mengingat Jawa Tengah merupakan Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke-3 di Indonesia.

Upaya penurunan kemiskinan telah menjadi agenda global dan nasional. Dalam tataran global, "Tanpa Kemiskinan" menjadi target ke 1 dari 17 target dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang kemudian diadopsi dalam kebijakan nasional dan daerah melalui dokumen perencanaan pembangunan. Hal tersebut merupakan kebijakan dalam merespons akan kebutuhan suatu daerah atau penyelesaian isu/permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah (Young & Quinn, 2002). Dalam upaya penurunan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) memiliki strategi untuk memenuhi kebutuhan dasar baik dari dimensi sosial, ekonomi dan finansial serta fisik yang salah satunya berupa tempat tinggal yang layak. Penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu bagian dari rencana aksi daerah pada bidang infrastruktur bersama dengan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak serta akses terhadap listrik yang menjadi satu kesatuan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Selain itu, penyediaan rumah layak huni juga turut mendukung pencapaian tujuan ke 11 SDG's yaitu "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan".

Masyarakat miskin tidak hanya memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan ekonomi, namun juga tentang pemahaman untuk mewujudkan rumah yang layak baik secara fisik, psikologis dan sosial (Arif, et al., 2024). Hal tersebut juga sejalan dengan teori Abraham Maslow yang dijelaskan oleh McLeod bahwa masyarakat miskin masih berkutat dengan kebutuhan paling dasar manusia yaitu kebutuhan psikologis/bertahan hidup dimana tempat tinggal dimaknai hanya kebutuhan untuk berlindung dari ancaman alam seperti terik panas matahari atau hujan (McLeod, 2024). Berdasarkan hal tersebut maka masyarakat miskin dengan tempat tinggal yang tidak layak menjadi dua sisi permasalahan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah

melakukan berbagai upaya salah satunya adalah pemberian bantuan stimulan pembangunan rumah baru layak huni bagi keluarga miskin yang belum memiliki rumah. Program tersebut dinamakan PB *Backlog*. Program PB *Backlog* telah dimulai sejak tahun 2020 dan terus berjalan sampai dengan saat ini. Bantuan stimulan ini diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial. Nilai bansos yang diberikan sebesar Rp 35 juta dalam bentuk material dan Rp1,8 juta untuk upah tenaga padat karya sebagai stimulan untuk membangun rumah inti. Material bangunan yang digunakan untuk membentuk struktur rumah menggunakan teknologi Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) yaitu rumah modular dengan sistem *knock down* yang memudahkan dan mempercepat proses pembangunan serta beberapa material bangunan untuk pembangunan rumah dengan luasan inti kurang lebih 27m².

Berdasarkan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 untuk program PB *Backlog* yang telah diimplementasikan pada 2020, maka dalam kurun waktu 4 tahun dapat dilihat dan dinilai kondisi rumah serta keberlanjutan dari program tersebut. Dari sebuah program yang bersifat stimulan maka diharapkan adanya peningkatan dan penyempurnaan rumah seiring berjalannya waktu sehingga kondisinya akan membaik, terlebih jika dilihat dari segi fisik dan komponennya sesuai dengan konsep Rumah Inti Tumbuh. Namun demikian, hanya sebesar 40,88% yang dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni, sisanya masih meninggalkan permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti ketiadaan akses air minum, sanitasi dan pengelolaan limbah, serta sambungan listrik yang merupakan komponen untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Berdasarkan kondisi tersebut maka **Program PB *Backlog* belum mampu mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Jawa Tengah secara paripurna**, oleh karena itu perlu adanya rekomendasi kebijakan untuk perbaikan dikemudian hari agar program tersebut dapat terwujud sesuai dengan kondisi yang diharapkan.

Penulisan makalah kebijakan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pengambil keputusan terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD terkait pada periode tahun 2025-2029. Makalah ini hanya menilai rumah layak huni berdasarkan aspek fisik bangunan yaitu berupa ketersediaan kamar mandi dan pendukung lainnya seperti akses

terhadap air minum, sanitasi, pengelolaan limbah dan sambungan listrik. Disisi lain, rumah layak huni dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kualitas pencahayaan dan sirkulasi udara rumah, kondisi lingkungan permukiman seperti ketahanan terhadap bencana, rendahnya ancaman bencana (banjir, longsor, dsb), memiliki akses jalan yang baik untuk evakuasi dalam kondisi darurat seperti bahaya kebakaran, sesuai dengan rencana tata ruang dan peruntukkan lahan serta memiliki legalitas hukum pada lahan yang ditempati.

Data yang terdapat dalam makalah ini berdasarkan pengambilan data primer dari 181 responden penerima program PB *Backlog* yang tersebar di 15 Kabupaten secara langsung dengan menggunakan instrumen kuesioner serta wawancara kepada tokoh kunci pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan pilihan kebijakan berdasarkan kriteria pembobotan. Selain itu, makalah ini juga menggunakan data sekunder yang berupa teori, konsep dan dasar hukum yang diambil dari berbagai macam sumber literatur dan peraturan. Makalah kebijakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan
II. Analisis dan Pembahasan Masalah
III. Pilihan Kebijakan
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi
V. Daftar Pustaka

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimal luas bangunan serta kesehatan penghuninya yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat), rumah layak huni harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Minimal Masa dan Ruang
   Rumah layak huni memungkinkan penghuni untuk dapat hidup sehat dan menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara layak. Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia minimal seluas 9m² per orang;
b. Kebutuhan Kesehatan dan Kenyamanan
   Rumah tinggal memenuhi syarat kesehatan dan kenyamanan yang dipengaruhi oleh 3 aspek yaitu pencahayaan, penghawaan serta suhu udara dan kelembaban dalam ruangan. Selain itu, dari aspek kesehatan juga harus memenuhi antara lain akses air minum dan limbah serta terdapat kamar mandi/WC;
c. Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan

Rumah layak huni memenuhi standar teknis sebagai bangunan rumah tinggal sederhana utamanya pada pondasi, dinding dan kerangka bangunan, atap serta lantai dengan spesifikasi sebagai berikut:

1) Pondasi

   Sistem pondasi yang digunakan antara lain adalah pondasi langsung, setempat dan pondasi tidak langsung yang dapat memikul beban kurang dari 2 ton (beban ringan);

2) Dinding

   Material dinding yang digunakan antara lain adalah dinding masif seperti bata, *conblock*, bata ringan serta dinding tidak masif seperti papan, kombinasi masif dan papan atau bahan lain seperti bambu namun harus dapat melindungi dari pengaruh buruk cuaca;

3) Kerangka Bangunan

   Struktur bangunan dapat menggunakan struktur beton bertulang, rangka kayu dan kombinasi dari rangka kayu. Kolom yang digunakan minimal kolom praktis yang mampu menahan beban atap dan beban angin;

4) Atap

   Material atap harus sesuai dengan spesifikasi pabrik (kemiringan dan rangka) atau menggunakan material yang dapat melindungi dari cuaca panas dan hujan serta memiliki tingkat ketahanan yang baik. Selain itu penggunaan material atap juga harus mempertimbangkan bahan yang digunakan (tidak beracun);

5) Lantai

   Lantai harus kedap air sehingga dapat menjaga kelembaban rumah (plester semen, tegel, keramik, dsb);

2. Konsepsi Rumah Tumbuh

Rumah tinggal adalah produk arsitektur yang dinamis dan melalui proses sosial, dan budaya yang dapat terus berkembang sehingga pemilik rumah memiliki ke-swadayaan dalam mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya (Raihan & Sulthan, 2020). Mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat miskin maka penyediaan rumah layak huni dapat dilakukan dengan menggunakan konsep Rumah Inti Tumbuh (RIT) dimana pembangunan rumah layak huni dimulai dari pembangunan rumah inti sebagai cikal bakal terwujudnya rumah layak huni. RIT adalah rumah yang hanya memenuhi standar kebutuhan minimal rumah dengan kriteria memiliki ruang paling sederhana yaitu sebuah ruang tertutup dan sebuah ruang terbuka beratap dan fasilitas MCK (Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002). Penggunaan teknologi RUSPIN memudahkan dalam mendukung konsepsi pembangunan rumah tumbuh bagi masyakarat miskin. Selain itu, penggunaan teknologi RUSPIN akan lebih menjamin kemanan dan keselamatan rumah karena telah

memenuhi standar teknis khususnya terkait struktur bangunan serta telah melalui uji teknis dan kontrol kualitas secara terukur.

Gambar 1. Modul dan Denah serta Bentuk RUSPIN Program PB *Backlog*
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2020

3. Kategori Keluarga Miskin

Pendataan keluarga miskin dilakukan secara terpadu oleh Kementerian Sosial yang terhimpun dalam Data DTKS. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, kemisikinan merupakan salah satu dari beberapa kriteria yang masuk kedalam data DTKS. Perorangan atau keluarga yang terdaftar dalam data tersebut berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial, bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar baik dari Pemerintah Pusat, Daerah, Desa maupun sumber pendanaan lainnya.

4. Evaluasi Pelaksanaan Program Kebijakan

Evaluasi program merupakan bagian dari sebuah proses penyusunan kebijakan yang baik. Evaluasi secara komprehensif adalah hal yang paling mendasar untuk menilai keberhasilan dan efektivitas dari sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan serta memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan untuk pengambil kebijakan di masa yang akan datang (Young & Quinn, 2002). Hal tersebut dapat disebut sebagai siklus kebijakan dimana proses pembuatan kebijakan melalui tahapan yaitu mendefinisikan masalah atau tujuan

yang ingin dicapai, membangun alternatif kebijakan/formulasi kebijakan, pilihan kebijakan, desain kebijakan, implementasi kebijakan dan pemantauan serta evaluasi.

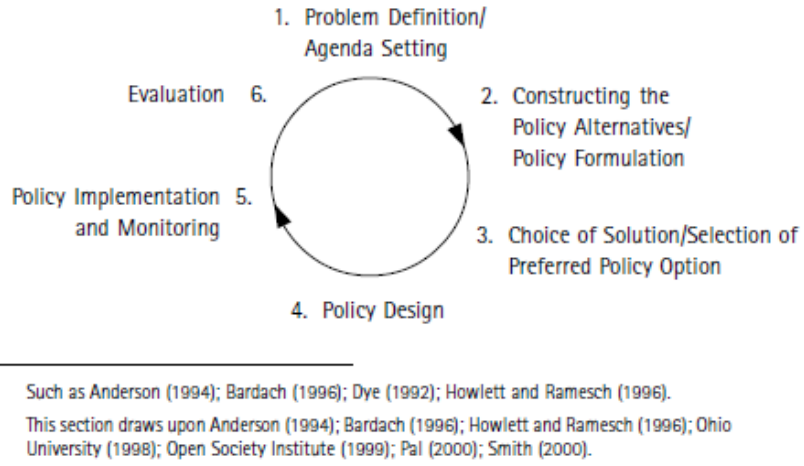

5 Such as Anderson (1994); Bardach (1996); Dye (1992); Howlett and Ramesch (1996).

6 This section draws upon Anderson (1994); Bardach (1996); Howlett and Ramesch (1996); Ohio University (1998); Open Society Institute (1999); Pal (2000); Smith (2000).

Gambar 2. Siklus Proses Penyusunan Kebijakan
Sumber: Young, E.; Quinn, L., 2002

5. Program PB *Backlog*

Program ini bukan merupakan salah satu program nasional/pusat namun merupakan inovasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menanggulangi kemiskinan dalam bentuk menyediakan rumah layak huni. Melalui penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin diharapkan pemerintah dapat menyediakan kebutuhan dasar serta mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kesehatan serta produktivitas. Beberapa kriteria dalam menentukan sasaran penerima antara lain:

- Keluarga terdaftar dalam data DTKS;
- Kondisi rumah yang ditempati tidak layak, dilihat dari kepadatan penghuni (lebih dari 2 Kepala Keluarga), serta kondisi fisik tidak layak huni;
- Memiliki lahan pribadi yang akan dibangun minimal seluas 6,5mx6,5m;
- Menyatakan kesanggupan dalam hal keswadayaan (dana dan tenaga);
- Bersedia menempati rumah setelah program selesai.

Berdasarkan kriteria di atas maka masih terdapat 59,12% yang dikategorikan sebagai rumah belum layak huni yang dibangun melalui program PB *Backlog*. Hal tersebut dimaknai bahwa setelah 4 tahun rumah selesai dibangun dan mulai ditempati, masih terdapat rumah yang belum memiliki kamar mandi, akses air minum dan sanitasi, tangki septik serta sambungan listrik. Dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, penghuni rumah masih menumpang kepada tetangga atau orangtua/ saudara dan bahkan mengakses kamar mandi/WC fasilitas umum seperti masjid/mushola. Kondisi tersebut tentu memiliki kerentanan di kemudian hari jika terjadi dinamika atau konflik maka

masyarakat tidak memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi. Pada akhirnya, kondisi tersebut juga dapat menyebabkan permasalahan kesehatan bagi penghuni dan lingkungannya. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan pada pohon masalah sebagai berikut.

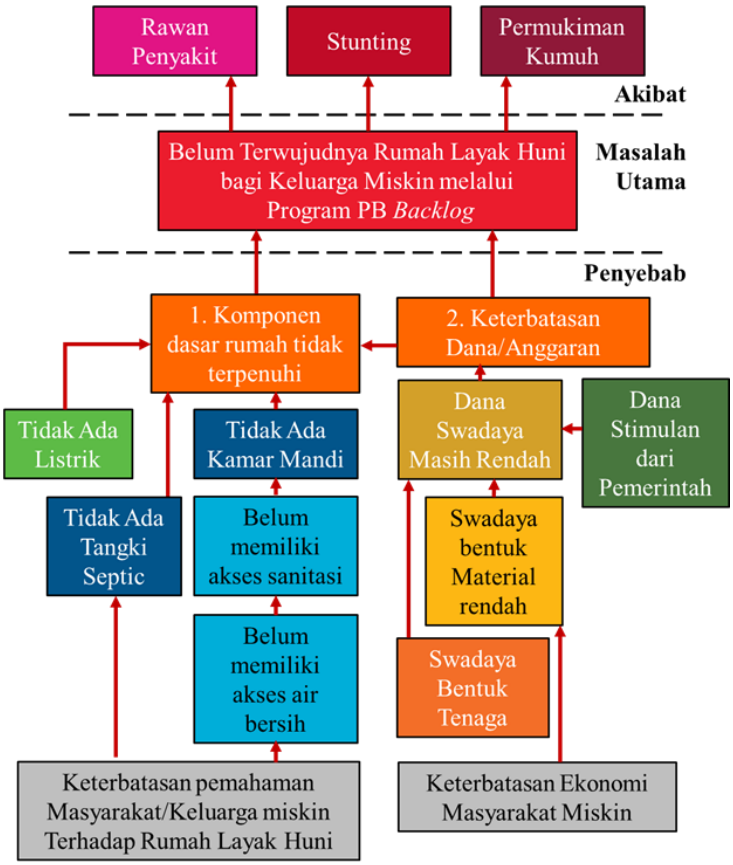

Gambar 3. Pohon Masalah Belum Terwujudnya Rumah Layak Huni bagi Keluarga Miskin melalui Program *PB Backlog*

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan pohon masalah di atas maka dapat dikelompokkan beberapa penyebab timbulnya permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya komponen dasar rumah

Pemenuhan komponen dasar rumah menjadi salah satu faktor yang menentukan bahwa rumah tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni. Kebutuhan dasar tersebut adalah air minum, penerangan, sanitasi dan saluran pembuangan limbah serta keamanan bangunan bagi aktivitas penghuninya untuk meraih produktivitas. Dari hasil evaluasi maka masih terdapat 59,12% yang dikategorikan belum layak huni karena tidak memenuhi kriteria diatas. Kondisi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tidak Ada Kamar Mandi/WC dan Sambungan Rumah Air Minum

Belum adanya kamar mandi/WC menjadi salah satu indikator rumah belum layak huni. Ketersediaan kamar mandi/WC dapat diartikan telah tersedia sanitasi di dalam rumah. Namun demikian, ketersediaan kamar mandi/WC perlu didukung dengan ketersediaan air minum aman yang dapat diakses pada masing-masing rumah dalam bentuk sambungan rumah (SR). Warga yang telah memiliki kamar mandi/WC jumlahnya cukup besar yaitu 62,98%, namun diantaranya masih ada 12,28% yang belum memiliki akses air minum sehingga masih perlu mengambil air minum dari tempat lain. Disisi lain rumah yang belum memiliki kamar mandi/WC sebesar 37,02%, mayoritas belum memiliki SR.

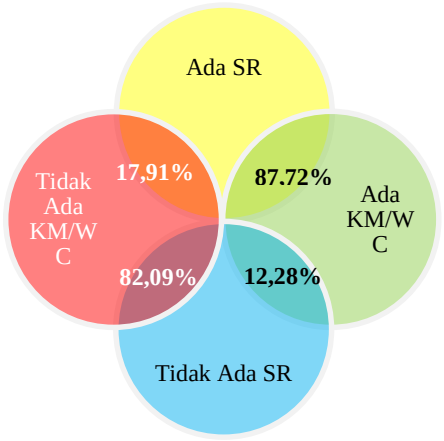

Gambar 4. Ketersediaan Kamar Mandi (KM/WC) dan Sambungan Rumah Air Minum (SR)
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

b. Tidak ada Tanki Septik

Tanki septik menjadi salah satu indikator bahwa penyediaan sanitasi dapat dikategorikan aman karena limbah terkelola dengan baik. Tangki septik disini bisa dalam bentuk mandiri maupun komunal. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat 15,78% yang telah memiliki kamar mandi namun tidak memiliki tangki septik sehingga kondisi tersebut dapat menyebabkan pencemaran yang dapat membahayakan bagi penghuni dan lingkungan disekitarnya. Permasalahan tidak adanya tangki septik tidak hanya terkait masalah biaya, namun juga masalah pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya komponen tersebut.

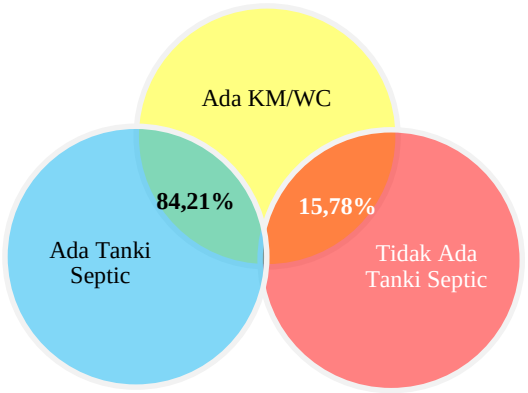

Gambar 5. Ketersediaan KM dan Tanki Septik
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

c. Tidak ada Sambungan Listrik

Walaupun tidak memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan penghuni rumah maupun lingkungan, namun kebutuhan akan listrik menjadi salah satu upaya pemenuhan energi untuk meningkatkan

produktivitas penghuni rumah seperti belajar, berwirausaha dan lain sebagainya. Selain itu, melalui pemberian listrik subsidi dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin jika dibandingkan dengan menggunakan energi lainnya seperti lampu minyak dan sejenisnya. Masih terdapat 38,67% yang tidak memiliki sambungan listrik langsung, mereka masih mengandalkan sambungan listrik dari rumah tetangga dan bahkan masih ada 5,52% yang belum memiliki akses listrik sama sekali. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki program Listrik Murah (Lismur) berupa sambungan rumah gratis bagi warga miskin dan program sambungan listrik gratis dari PLN. Namun demikian, jumlahnya masih sangat sedikit yang dapat dikolaborasikan dalam program PB *Backlog* yaitu 8,83%. Sisanya masyarakat melakukan penyambungan secara swadaya.

	Listrik Gratis PLN	Program Lismur Provinsi Jawa Tengah	Total
Sumber Sambungan Listrik	6,07%	2,76%	8,83%

Tabel 1. Sumber Pendanaan/Program Sambungan Listrik
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

2. Permasalahan Keterbatasan Dana/ Anggaran

Bantuan stimulan merupakan dana yang diberikan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin secara bertahap. Permasalahan kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, namun juga masalah sosiologis dan psikologis sehingga program-program pembangunan harus bersifat mendorong serta memberdayakan daya dan upaya masyarakat (Rahman, et al., 2019). Selain itu, melalui bantuan stimulan maka akan tercipta partisipasi masyarakat yang berarti melibatkan masyarakat secara aktif dan langsung dalam proses pembangunan mulai dari perencanaannya hingga pelaksanaan dan evaluasinya. Ini mengubah kondisi sebelumnya dimana masyarakat hanya menjadi objek pembangunan dan lebih bersifat pasif (Rahman, 2016). Oleh karena itu, bantuan stimulan dari pemerintah dan dana swadaya masyarakat menjadi satu kesatuan pendanaan yang saling melengkapi sehingga tujuan pembangunan rumah layak huni dapat tercapai.

Permasalahan keterbatasan dana bukan berarti tidak ada anggaran untuk membangun, namun bantuan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah hanya akan mencapai pada wujud rumah inti berupa struktur bangunan yaitu dinding, atap dan lantai seluas 27m² dengan ruang tertutup terdiri dari 1 kamar tidur. Dalam rangka penyelesaian pembangunan maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk

melengkapi komponen lainnya agar menjadi rumah layak huni. Seluruh penerima program PB *Backlog* adalah keluarga miskin dengan mayoritas rumah dihuni oleh keluarga dengan jumlah anggota 3 orang atau lebih (80,67%), sedangkan rumah yang dihuni oleh keluarga yang terdiri dari 1 dan 2 orang rata-rata disebabkan karena salah satu anggota keluarga merantau atau sudah meninggal dunia pada saat dilakukan evaluasi.

Dalam mengakomodir kebutuhan ruang yang semakin besar untuk menampung jumlah anggota keluarga yang diatas 3 orang (Gambar 6) maka masyarakat penerima program cenderung memprioritaskan untuk menambah ruang dan luas rumah dibanding penyediaan komponen dasar. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan anggaran semakin membengkak sehingga membebani dana swadaya dari masyarakat dan menyebabkan risiko tidak terselesaikannya pembangunan rumah dan terpenuhinya komponen dasar.

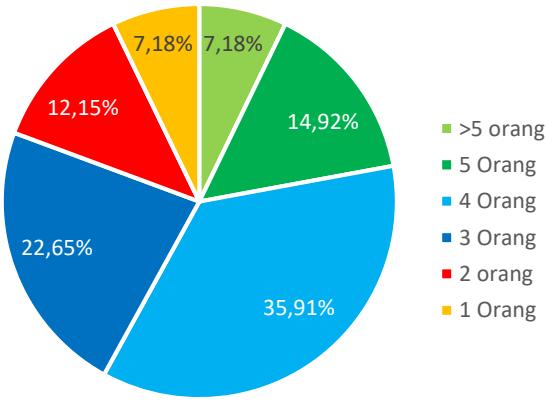

Gambar 6. Jumlah Anggota Keluarga Penerima Program PB *Backlog*
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Keterbatasan anggaran untuk pembangunan menyebabkan beberapa permasalahan yang dapat diungkap dari beberapa hasil temuan antara lain sebagai berikut:

a. Progres penyelesaian pembangunan

Progres penyelesaian pembangunan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu antara 0-49%; 50-99% dan 100%. Pembangunan mencapai 100% dapat diartikan bahwa pembangunan rumah inti telah selesai yaitu bangunan minimal seluas 27m² meliputi struktur, fungsi ruang dan arsitektural (*finishing*) serta terdapat 1 kamar tidur dan kamar mandi/WC. Sedangkan pembangunan yang mencapai progres 50-99% artinya pembangunan melalui pembangunan stimulan telah selesai baik secara fisik dan administrasi namun masih menyisakan kekurangan pada beberapa hal yang bersifat minor dan non fungsional seperti pemasangan kusen dan daun pintu atau belum terpenuhinya beberapa komponen dasar seperti kamar mandi/WC. Untuk progres pembangunan 0-49% dapat diartikan bahwa hanya pembangunan yang bersumber dari bantuan stimulan telah selesai dilaksanakan dibantu dengan tenaga swadaya masyarakat namun belum dapat membentuk rumah inti beserta seluruh komponennya.

Berdasarkan data yang ada, terdapat 13,81% yang tidak dapat selesai secara fisik bangunan (progres 0-49%). Data tersebut selengkapnya dapat dilihat pada gambar 7.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa, dana stimulan yang diberikan melalui program PB *Backlog* ditambah dengan swadaya masyarakat baik berupa material maupun tenaga belum dapat menyelesaikan bangunan inti rumah sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa antara dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah masih memiliki kelemahan dan risiko terhadap tidak terselesaikannya program.

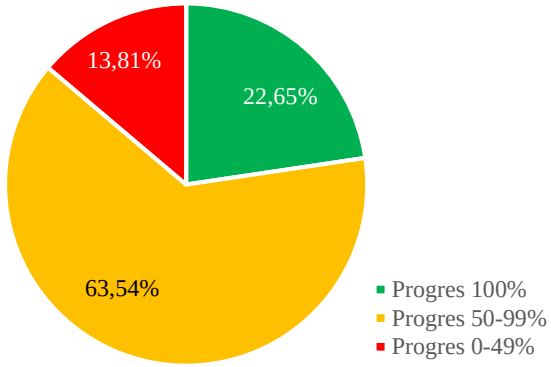

Gambar 7. Progres Penyelesaian Program *PB Backlog*
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

b. Besaran Dana Swadaya Masyarakat

Dana swadaya masyarakat merupakan dana partisipasi yang dikeluarkan oleh peserta dalam program PB *Backlog*. Adanya partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur adanya pemberdayaan sebagaimana dijelaskan dalam tangga partisipasi Arnstein (Arnstein , 1969). Dana swadaya dihitung dengan mengasumsikan biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pembelian material maupun tenaga yang dikerahkan dalam proses pembangunan. Tenaga yang dikeluarkan bisa dari kegiatan gotong royong komunitas/masyarakat maupun perseorangan. Besaran dana swadaya sangat variatif (Gambar 8), namun demikian rata-rata besaran dana swadaya masyarakat paling banyak antara Rp 21 Juta hingga Rp30 Juta sebesar 24,86% dan Rp11 Juta hingga Rp20 Juta sebesar 22,65%. Sumber dana untuk swadaya masyarakat juga sangat bervariasi antara lain dari dana pribadi, sumbangan keluarga/masyarakat, ziswaf, bahkan sampai dengan harta warisan. Penerima bantuan lebih mudah jika memberikan bantuan tenaga sebagai bentuk swadaya jika dibandingkan dengan dalam bentuk material bangunan mengingat keterbatasan kondisi ekonomi.

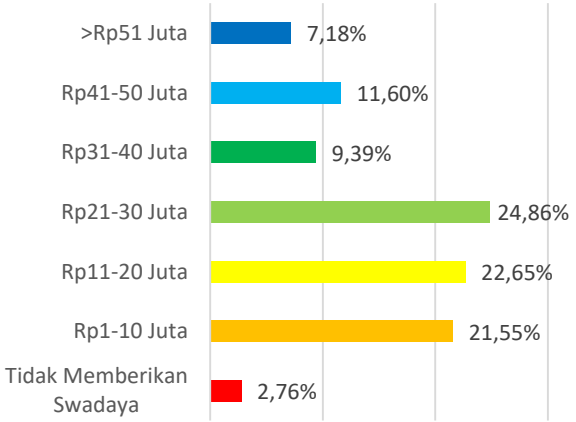

Gambar 8. Besaran Dana Swadaya Masyarakat
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

c. Keterkaitan antara Progres Penyelesaian dengan Besaran Dana Swadaya Masyarakat

Potensi risiko tidak terselesaikannya program berupa bantuan stimulan pada program ini sebesar 13,81% yaitu rumah yang progress pembangunannya sebesar 0-49%. Berdasarkan analisis keterkaitan antara progres penyelesaian pembangunan dengan besaran dana swadaya maka dapat dilihat bahwa 13,81% yang progres pembangunannya tidak selesai (0-49%) memiliki nilai swadaya dibawah Rp10 juta (60%). Hal tersebut menggambarkan bahwa masyarakat telah berusaha untuk memberikan swadaya namun tetap belum dapat menyelesaikan pembangunan rumah inti. Selain itu, juga terdapat beberapa faktor lain yang menyebabkan tidak selesainya pembangunan antara lain adalah meninggal dunia, penggunaan material terlalu boros serta penambahan ruang yang berlebihan sehingga menyebabkan dana yang dibutuhkan semakin besar.

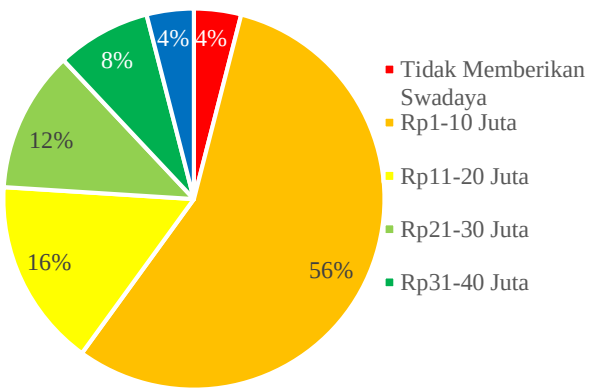

Gambar 9. Besaran Dana Swadaya Masyarakat pada Progress 0-49%
Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

PILIHAN KEBIJAKAN

Kebijakan publik merupakan sebuah aksi yang dilakukan oleh pemerintah baik di level nasional, daerah atau lembaga lainnya dalam rangka merespon terhadap isu atau permasalahan yang berkembang di masyarakat utamanya adalah isu dan permasalahan yang dianggap penting oleh pemerintah dan masyarakat (Judijanto, et al., 2024). Program PB *Backlog* merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang bersifat redistributif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Tengah khususnya melalui penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan kurang lebih selama 5 tahun dan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki. Hal tersebut merupakan bagian dari siklus kebijakan sehingga kebijakan mendatang dapat semakin lebih baik untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Young & Quinn menjelaskan bahwa dalam menentukan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan berbagai penyebab permasalahan di atas perlu memperhatikan beberapa hal antara lain sebagai berikut:

1. Targetnya adalah pemangku kepentingan selaku pengambil keputusan;

2. Kebijakan bersifat spesifik dan dapat dilaksanakan di lapangan;
3. Tidak harus selalu berdasarkan hasil riset; dan
4. Harus jelas dan sederhana;

Dengan mempertimbangkan hal di atas, dilakukan analisis menggunakan metode SWOT dengan mengidentifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*) yang merupakan analisis internal serta peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang berdasarkan analisis eksternal sebagaimana dapat dilihat pada gambar 10.

Internal	
S (kekuatan)	W (kelemahan)
● Penanggulangan Kemiskinan menjadi Prioritas Nasional dan Daerah ● Ada Peraturan Gubernur Jawa Tengah terkait strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang salah satunya adalah pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin ● Ada pendanaan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan utamanya pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin yang belum memiliki rumah ● Ada potensi swadaya dari penerima baik berupa material/uang maupun tenaga ● Adanya tim fasilitator lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dapat membantu dan memfasilitasi selama proses pembangunan	● Masyarakat miskin memiliki keterbatasan ekonomi ● Rendahnya pemahaman masyarakat miskin terhadap pentingnya pemenuhan air bersih dan sanitasi layak termasuk pengelolaan limbah domestik ● Masyarakat miskin tidak dapat atau terbatas dalam memberikan swadaya dalam bentuk material/uang ● Swadaya yang diberikan selama ini sudah cukup membebani masyarakat miskin ● Bantuan Stimulan dalam bentuk RUSPIN dengan ukuran luas 27m³ tidak dapat mengakomodir kebutuhan untuk rata-rata 4 anggota keluarga sehingga untuk mengakomodir hal tersebut perlu biaya yang semakin besar melalui swadaya masyarakat
O (peluang)	T (ancaman)
● Budaya gotong royong yang ada di masyarakat dapat membantu dalam proses pembangunan sehingga dapat mengurangi biaya pembangunan ● Ada potensi pendanaan dari berbagai sektor untuk mengatasi permasalahan kemiskinan utamanya untuk kolaborasi dalam pemenuhan rumah layak huni ● Ada Pemerintah Desa dan Kabupaten/Kota yang dapat memberikan fasilitasi serta dukungan anggaran	● Harga material bangunan semakin naik dari tahun ke tahun meyebabkan berkurangnya kuantitas material yang diberikan ● Para pemangku kepentingan memiliki kepentingan masing-masing sehingga menyebabkan perbedaan sasaran penerima ● Perubahan kebijakan akibat dinamika politik
Eksternal	

Gambar 10. Analisis SWOT mewujudkan

Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin melalui Program PB *Backlog*
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan pemetaan dalam analisis SWOT di atas maka dapat diformulasikan beberapa alternatif strategi menggunakan matrik SWOT (Groenendijk, 2003) sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11. Dengan menggunakan metode tersebut maka dapat ditentukan beberapa pilihan alternatif strategi antara lain adalah sebagai berikut:

Internal Factors / External Factors	**Strengths (S)** List 5 to 10 internal strengths here	**Weaknesses (W)** List 5 to 10 internal weaknesses here	
Opportunities (O) List 5 to 10 external opportunities here	**SO Strategies** Generate strategies here that use strengths to take advantage of opportunities	**WO Strategies** Generate strategies that take advantage of opportunities by overcoming weaknesses	**OT Strategies** Generate strategies that use opportunities to combat threats
Threats (T) List 5 to 10 external threats here	**ST Strategies** Generate strategies here that use strengths to avoid threats	**WT Strategies** Generate strategies here that minimise weaknesses and avoid threats	
	SW Strategies Generate strategies that use strengths to mitigate weaknesses		**Synthesis**

Gambar 11. Perumusan Alternatif Strategi menggunakan Matrik SWOT
Sumber: Groenendijk, 2003

1. **Strategi 1 (S-O): Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan;**

   Strategi ini dapat diimplementasikan karena sejalan dengan kebijakan global dan nasional yaitu tercantum dalam SDG's yang ditindaklanjuti dalam Rencana Aksi Nasional dan Daerah serta Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Kebijakan tersebut dapat dijabarkan dalam RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2025-2029;

2. **Strategi 2 (W-O): Mendorong peran komunitas masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin;**

   Berdasarkan data hasil evaluasi, penerima bantuan serta kelompok masyarakat telah

memberikan kontribusi berupa material maupun tenaga yang cukup besar yaitu rata-rata senilai Rp 27,58 Juta. Namun demikian, bantuan stimulan dan swadaya masyarakat belum mampu sepenuhnya mewujudkan rumah layak huni yang diakibatkan karena keterbatasan ekonomi masyarakat miskin.

3. **Strategi 3 (S-T): Peningkatan bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi untuk mengurangi beban swadaya dari masyarakat miskin dalam mewujudkan rumah layak huni;**

   Bantuan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa tengah berupa RUSPIN seluas bangunan 27m³, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) luasan bangunan untuk 4 Jiwa adalah 36m³ sebagaimana gambar 12.

   Oleh karena itu perlu peningkatan nilai bantuan stimulan berupa RUSPIN seluas 36m³ untuk mengakomodir kebutuhan ruang serta material kamar mandi untuk memenuhi komponen standar rumah layak huni serta mengurangi beban dana swadaya;

Standar per Jiwa (m2)	Luas (m2) untuk 3 Jiwa				Luas (m2) Untuk 4 jiwa			
	Unit Rumah	Lahan (L)			Unit Rumah	Lahan (L)		
		Minimal	Efefktif	Ideal		Minimal	Efefktif	Ideal
(Ambang batas) 7,2	21,6	60,0	72 - 90	200	28,8	60,0	72 - 90	200
(Indonesia) 9,0	27,0	60,0	72 - 90	200	36,0	60,0	72 - 90	200
(Internasional) 12,0	36,0	60,0	---	---	48,0	60,0	---	---

Gambar 12. Kebutuhan Luas Minimum Bangunan dan Lahan untuk Rs Sehat
Sumber: Kementerian Kimpraswil, 2002

4. **Strategi 4 (W-T): Mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan potensi pendanaan dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin;**

   Strategi ini bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam mewujudkan rumah layak huni dengan mendorong peran serta dari berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam pembangunan. Namun demikian, terdapat berbagai kendala yang disebabkan oleh faktor eksternal sehingga sulit mengimplementasikan di lapangan;

5. **Strategi 5 (S-W): Peningkatan peran fasilitator lapangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat miskin akan pentingnya pemenuhan air minum dan sanitasi layak serta pengelolaan limbah domestik;**

   Perlunya keberadaan fasilitator lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat miskin tentang arti pentingnya rumah layak huni bagi kehidupan serta komponen prioritas yang harus dipenuhi dalam mewujudkan rumah layak huni. Namun demikian, pemenuhan beberapa komponen pelengkap untuk mewujudkan rumah layak huni tersebut diharapkan dari kontribusi masyarakat melalui swadaya sehingga apabila terdapat keterbatasan swadaya menyebabkan tidak terpenuhinya komponen tersebut;

6. **Strategi 6 (O-T): Peningkatan peran Pemerintah Desa atau Kabupaten/Kota sebagai kolaborator dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di wilayahnya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada (Strategi O-T);**

   Pemerintah Provinsi dapat mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa untuk dapat berperan sebagai aktor yang dapat mengkolaborasikan berbagai sumber pendanaan dan program untuk dapat menyelesaikan permasalah penyediaan rumah bagi masyarakat miskin. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dapat berkontribusi dalam fasilitasi maupun pembiayaan program mewujudkan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Namun demikian, masing-masing Daerah memiliki kebijakan dan prioritas masing-masing sesuai dengan permasalahan dan kewenangannya.

Dari beberapa alternatif strategi di atas maka dapat dilakukan pemilihan untuk menentukan rekomendasi strategi terbaik yang selanjutnya akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan publik dengan mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut (Bardach & Patashnik, 2016):

- Efisiensi (*Efficiency*), memiliki makna yang tidak lepas dari pengertian dalam konteks ekonomi yaitu mendapatkan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya dari keputusan yang diambil terutama dari sudut kepentingan pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Kesetaraan dan keadilan (*Equity*), nilai bantuan stimulan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus dapat mendorong swadaya masyarakat sehingga dapat mewujudkan masyakarat yang berdaya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin;
- Penerimaan secara politis (*Political Acceptability*), kelayakan sebuah kebijakan harus dapat diterima secara

politis oleh berbagai pihak yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa serta sektor lain yang terkait. Selain itu sebuah kebijakan publik diharapkan dapat terus berkelanjutan dan tidak mudah berubah akibat dinamika politik;

- Ketangguhan (*Robustness*), memiliki arti bahwa kebijakan seringkali terlihat bagus dan hebat secara teori namun sulit untuk diimplementasikan di lapangan. Kebijakan harus fleksibel dan *improvability* baik secara administrasi maupun birokrasi.

Berdasarkan kriteria di atas maka dilakukan pemilihan melalui metode pembobotan (Dunn, 2018) melalui wawancara dengan beberapa tokoh kunci pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- Pengaruh kuat memiliki nilai 3;
- Pengaruh sedang memiliki nilai 2 dan;
- Pengaruh lemah memiliki nilai 1.

Pilihan Strategi	Kriteria				**Total Nilai**
	Efektivitas	Kese-taraan	Politis	Ketang-guhan	
1. Penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan	2	3	3	3	**11**
2. Mendorong peran komunitas masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	3	2	2	1	**8**
3. Peningkatan bantuan stimulan dari Pemerintah Provinsi untuk mengurangi beban swadaya dari masyarakat miskin dalam mewujudkan rumah layak huni	2	3	3	2	**10**
4. Mendorong kolaborasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan potensi pendanaan dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin	2	2	2	1	**7**
5. Peningkatan peran fasilitator lapangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat miskin akan pentingnya pemenuhan air minum dan sanitasi layak serta pengelolaan limbah domestik	2	3	2	2	**9**
6. Peningkatan peran Pemerintah Desa atau Kabupaten/Kota sebagai kolaborator dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di wilayahnya dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada	2	2	1	1	**6**

Tabel 2. Pemilihan Kebijakan melalui Kriteria dan Pembobotan

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Strategi berupa penetapan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan dipandang paling penting karena menjadi dasar atau landasan atas sebuah kebijakan dalam program ini. Pandangan tersebut disebabkan karena sampai dengan saat ini tidak ada peraturan perundangan yang memberikan kewenangan secara lugas kepada pemerintah provinsi terkait penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin. Oleh sebab itu dengan menetapkan kemiskinan sebagai salah satu

permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah maka urusan perumahan memiliki kewajiban untuk mendukung kinerja tersebut salah satunya melalui Program PB *Backlog*.

Upaya peningkatan bantuan stimulan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kesetaraan dan keadilan. Mayoritas masyarakat penerima bantuan telah memberikan swadaya baik material maupun tenaga dalam nominal yang rata-rata hampir sama dengan bantuan stimulan yang diterima, namun masih terdapat risiko tidak terselesaikannya pembangunan akibat kekurangan dana. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang minimal untuk menampung anggota keluarga dan pemenuhan komponen dasar rumah layak huni serta mempertimbangkan kenaikan harga material bangunan maka perlu adanya kenaikan bantuan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi. Selain itu, strategi ini juga dianggap memiliki penerimaan yang lebih baik secara politis oleh berbagai pihak karena berasal dari faktor internal sehingga tidak bergantung pada faktor eksternal.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Program PB *Backlog* bertujuan untuk menyediakan rumah layak huni bagi masyakarat miskin yang belum memiliki rumah. Program ini bersifat stimulan sehingga diharapkan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan dalam pembangunan serta peningkatan kualitas seiring berjalannya waktu. Namun demikian, masih terdapat rumah yang belum layak huni disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah keterbatasan ekonomi dan pemahaman masyarakat tentang rumah layak huni serta keterbatasan biaya pembangunan akibat tingginya kebutuhan dalam pembangunan. Beberapa rekomendasi perbaikan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendorong upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah pada RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029. Sebagai salah satu prioritas pembangunan maka berbagai upaya yang akan dilakukan akan mendapat dukungan secara politis, pendanaan serta mendorong berbagai pihak lainnya untuk ikut serta dalam program dimaksud;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat membuat kajian untuk evaluasi nilai bantuan stimulan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Program PB *Backlog* dalam rangka untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan dasar rumah inti tumbuh agar

layak huni bagi masyarakat miskin dengan tetap mengoptimalkan peran swadaya dan kolaborasi dengan pihak lain. Kebijakan ini perlu dilakukan mengingat bantuan untuk bangunan seluas 27m³ tidak dapat mengakomodir kebutuhan ruang serta berbagai komponen dasar rumah untuk menjadi rumah layak huni, selain itu perlu dipertimbangkan juga kenaikan harga material akibat faktor inflasi.

Makalah kebijakan ini perlu ditindaklanjuti dengan berbagai kajian lainnya yang mendukung seperti kajian teknis dan pembiayaan dalam mewujudkan rumah layak huni bagi keluarga miskin, kelayakan rumah dipandang dari sektor selain kebutuhan fisik dasar, faktor pemberdayaan masyarakat dalam keberhasilan program PB *Backlog* serta kajian terkait kemampuan serta pemahaman masyarakat miskin akan kebutuhan rumah layak huni.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, A. Z., Murodi, A. & Rantau, M. I., 2024. Implementation Of The Rehabilitation Program For Uninhabitable Houses. *International Journal of Education, Information Technology and Others,* p. 340–348.

Arnstein , S., 1969. A Ladder of Citizen Participation. *JAIP*, Volume 35, pp. 216-224.

Badan Pusat Statistik, 2024. *Indikator Utama Sosial, Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah.* Semarang: s.n.

Bardach, E. & Patashnik, E. M., 2016. *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path To More Effective Problem Solving.* 5 ed. California: Sage.

Dunn, W. N., 2018. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach.* 6 ed. New York: Routledge.

Groenendijk, L., 2003. *Planning and Management Tools.* Enschede: The International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation.

Judijanto, L., Yumame, J. & Pugu, M. R., 2024. Implementation of Public Policy in Improving Public Welfare. *Jurnal Administrasi Negara,* Volume Vol. 2 No. 3, pp. 125-133.

Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002. *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat).* Jakarta: Kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Kementerian Sosial, 2021. *Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

McLeod, S., 2024. Maslow's Hierarchy of Needs.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2024, n.d. *Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026.* Semarang: s.n.

Rahman, A., 2016. Pendekatan Partisipatif dalam Pengembangan Komunitas. *Antara Pengembangan Komunitas, Partisipasi, dan Pemberdayaan: Sebuah Modul.*

Rahman, P. A., Firman & Rusdinal, 2019. Kemiskinan dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai.*

Raihan, M. & Sulthan, F., 2020. *Penerapan Konsep Rumah Tumbuh pada Teknologi Struktur RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat).* Palembang, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.

UN Habitat, 2022. *The Sustainable Development Goals Report.* s.l.:s.n.

Young, E. & Quinn, L., 2002. *Writing Effective Public Policy Papers.* Budapest: Open Society Institute.